

BAB II

Dinamika Konflik Sengketa Wilayah India dan Pakistan di Kashmir

Kashmir merupakan wilayah yang penting bagi India dan Pakistan yang merupakan dua negara yang saat ini masih bersengketa untuk merebut wilayah tersebut. Salah satu alasan dari konflik di Kashmir ialah karena berharganya Kashmir dalam hal sumber daya, keamanan nasional dan geografi. Sungai Indus yang mengalir melalui Kashmir sangat berperan penting dalam irigasi India dan pertanian Pakistan. Disamping itu, sungai dan badan air di Kashmir juga memiliki potensi untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga air dalam skala besar sehingga pemerintah India berkeinginan untuk menguasai wilayah tersebut. Pertumbuhan populasi India yang dibarengi dengan peningkatan kebutuhan listrik membuat India melihat wilayah Kashmir untuk mendapatkan lebih banyak fasilitas hidro yang mana berujung pada munculnya kekhawatiran Pakistan apabila India sewaktu-waktu mengalihkan air dari Kashmir yang diperlukan untuk irigasi. Sehingga pada tahun 1960, ditengahi oleh Bank Dunia kedua negara yaitu India dan Pakistan menandatangani perjanjian Indus. Hasil dari perjanjian tersebut ialah dimana India memegang kendali atas sungai Beas, Ravi dan Sutlej sementara Pakistan memegang kendali atas sungai Indus, Chenab dan Jhelum (The Diplomat, 2016). Dalam bidang sumber daya alam Kashmir merupakan wilayah yang memiliki potensi uranium, gas alam, minyak dan emas. Dari sudut pandang geopolitik Kashmir juga memiliki peran penting karena menjadi jembatan antara Asia Selatan dan Asia Tengah. Bagi India, Kashmir merupakan satu-satunya rute langsung ke Asia Tengah dan melalui Asia Tengah ke Eropa yang mana Kashmir memainkan peran

kunci dalam jalan. Apabila India menguasai seluruh Kashmir maka akan banyak pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang akan membawa tingkat kemakmuran ke wilayah tersebut. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan keamanan yaitu mencegah serangan teroris dengan membuat penempatan militer Pakistan lebih jauh dari kota-kota besar India karena apabila Pakistan diberikan kesempatan untuk menempatkan pasukannya dekat dengan India maka ancaman serangan akan lebih tinggi (storymaps.argics, 2021).

Bagi Pakistan, wilayah Kashmir menjadi kunci untuk *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) yang merupakan proyek bilateral dalam skala besar yang melibatkan pengembangan infrastruktur di Pakistan serta pembuatan berbagai proyek energi dan pembentukan jaringan transportasi antara China dan Pakistan (Srijournal, 2020). Sebagian besar proyek tersebut dijalankan melalui wilayah Kashmir yang dikelola oleh Pakistan yang ingin digunakan oleh Pakistan untuk pengantar hubungan langsung antara Asia Tengah dan China. Disamping itu, peran besar Kashmir bagi Pakistan yang menyajikan sumber daya yang diperlukan sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup rakyat Pakistan. Jika seluruh wilayah Kashmir diambil dari Pakistan maka kekeringan berskala besar akan melanda Pakistan. Disamping itu, apabila wilayah tersebut dihapus dari kekuasaan Pakistan maka akan mengakibatkan pergeseran kekuasaan yang meluas. Dengan kata lain, hal ini memberikan kesempatan bagi India untuk memegang kendali penuh atas wilayah Kashmir dan pasukan India akan ditempatkan dekat dengan kota-kota besar penting Pakistan. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi Pakistan karena mereka berpandangan jika pasukan India semakin dekat maka kemungkinan mereka akan

mengambil alih kota-kota Pakistan dan melukai warga dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pasukan India di wilayah Kashmir.

Bab ini akan membahas tentang latar belakang dari timbulnya konflik antara Pakistan dan India di Kashmir. Disamping itu bab ini juga akan menguraikan perang-perang yang terjadi di Kashmir akibat dari sengketa antara kedua negara India dan Pakistan. Sejauh ini, terdapat 4 perang besar yang pecah akibat dari sengketa yang juga banyak memakan korban jiwa. Pada bagian akhir, bab ini membahas tentang bagaimana dampak dari sengketa pada kekerasan terhadap wanita yang cukup banyak terjadi di wilayah konflik tersebut.

2.1 Latar Belakang Konflik India-Pakistan di Kashmir

Akar konflik antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir bermula sejak masa kolonial Inggris di wilayah tersebut. Dari abad ke-17 hingga abad ke-20, Inggris telah menguasai sebagian besar anak benua India. Pertama, secara tidak langsung melalui *British East Company* lalu menguasai secara langsung pada tahun 1828 melalui "*British Crown*". Seiring waktu, kekuasaan Inggris atas koloninya semakin melemah, sementara gerakan nasionalis semakin berkembang yang kemudian berpotensi mengancam kekuasaan kerajaan Inggris. Dibawah ketakutan perang saudara antara minoritas muslim dan mayoritas Hindu India, Inggris berupaya untuk memberikan kemerdekaan kepada koloninya. Pecahnya perang dunia II membuat parlemen memutuskan pemerintah Inggris harus meninggalkan India. Prinsip pembagian untuk negara pangeran dilakukan dengan cara wilayah mayoritas muslim akan bergabung dengan wilayah mayoritas Pakistan dan Hindu

akan bergabung dengan India. Pada 15 Agustus 1947, seluruh negara bagian pangeran akhirnya mengaksesi Pakistan dan India kecuali 3 negara bagian yaitu Kashmir, Junagedh dan Hyderabad (Sadia, 2016). Selama berada dibawah kekuasaan Inggris, keberadaan wilayah Kashmir masih terjamin bahkan kelemahan dalam segi strukturnya belum menjadi masalah besar. Namun, setelah penarikan Inggris dari Asia Selatan pada tahun 1947, Kashmir harus membuat keputusan dalam memilih bergabung dengan India atau Pakistan sesuai dengan kesepakatan kedua negara tersebut untuk pembagia anak benua India. Hari Singh yang merupakan pemimpin Kashmir pada saat itu menunda untuk membuat keputusan dengan harapan dapat mempertahankan kemerdekaan Kashmir. Namun, tindakan tersebut justru membuat Kashmir terjebak dalam serangkaian konflik setelah Hari Singh menandatangani aksesi ke India pada Oktober 1947. Junagedh dan Hyderabad merupakan wilayah dengan masyoritas penduduk Hindu dengan penguasa muslim. Penguasa kedua negara ini ingin bergabung dengan Pakistan akan tetapi Lord Mountbatten yang merupakan Gubernur Jenderal India menyatakan jika penerimaan Pakistan terhadap aksesi tersebut telah melanggar prinsip-prinsip terkait pembagian India yang telah disepakati dan dilaksanakan. Di Kashmir terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dimana penguasa Jammu dan Kashmir merupakan seorang Hindu sehingga mungkin akan lebih condong ke India, akan tetapi rakyatnya mayoritas beragama muslim sehingga lebih memilih untuk bergabung dengan Pakistan. Kondisi ini semakin sulit dan membingungkan ketika Sheikh Mohammed Abdullah yang merupakan pemimpin muslim terkemuka dan penyelenggara Konferensi Nasional Jammu dan Kashmir cenderung mendukung

aksesi ke India. Sementara Maharaja Hari Singh yang merupakan penguasa Kashmir secara diam-diam menyembunyikan visinya yaitu kemerdekaan Kashmir dan mengabaikan aturan yang telah diberikan oleh Lord Mountbatten. Akibatnya, Maharaja Singh cenderung enggan menanggapi Liga Muslim dan Konferensi Nasional karena keinginannya untuk mendeklarasikan kemerdekaan Kashmir dengan dirinya yang akan menjadi raja. Aktivis jemaat Islam Kashmir berkeinginan untuk bergabung dengan Pakistan jika menjadi negara Islam. Konferensi Muslim juga mengeluarkan resolusi untuk bergabung dengan Pakistan. Tidak hanya itu, partai sosialis juga ingin ingin Kashmir bergabung dengan Pakistan (Adi Magazine, 2020).

Pakistan kemudian mengikuti perintah dari Gubernur Jenderal India dan India secara paksa mencaplok negara bagian Junagedh dan Hyderabad. Akan tetapi di sisi lain, Lord Mountbatten menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap Kashmir dimana mereka mengeluarkan aturan dimana bagian wilayah Kashmir yang strategis dianeksasi oleh India karena alasan penguasa Hindu menginginkan kerajaannya memiliki populasi muslim. Kebijakan ini kemudian memicu protes dari Pakistan yang diikuti dengan konflik bersenjata diantara keduanya dan India membawa masalah ini ke PBB. Melalui resolusi 47, India diminta untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada masyarakat Jammu dan Kashmir untuk menentukan masa depan politik mereka. Namun, India enggan untuk melakukan plebisit dan memberikan hak tersebut dengan alasan bahwa Pakistan yang telah menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat dianggap mengancam keamanan India. Akibat dari sengketa ini, di Kashmir telah terjadi

beberapa kali perang. Semenjak pemisahan sebagai dua negara mereka, Pakistan dan India masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Kedua negara telah berperang sebanyak empat kali untuk memperjuangkan sengketa Kashmir.

2.1.1 Perang Indo-Pakistan Pertama

Perang pertama antara di Kashmir dilatarbelakangi oleh ketakutan akan akses Kashmir ke India. Visi Maharaja Singh untuk kemerdekaan Kashmir dan menjadi pemimpin segera digagalkan oleh seorang pemuda bernama Mohammed Ibrahim Khan yang terlibat dalam gerakan pembebasan melawan pemerintahan Hari Singh pada Agustus 1947. Gerakan ini bekerjasama dengan suku Pathan dari Pakistan. Pada bulan September dan awal Oktober, invasi suku Pathan semakin meluas hingga ke lembah yang berada dalam jarak beberapa mil dari Srinagar yang merupakan ibu kota Kashmir. Pada bulan Oktober 1947 pasukan suku yang berasal dari Pakistan serta pasukan Pakistan menyerbu Jammu dan Kashmir dengan maksud untuk mencaplok wilayah tersebut. Pasukan Pakistan langsung menyeberang ke Kashmir untuk memulai perang tanpa mengumumkan terlebih dahulu pada pihak India. Tentara Kashmir menyusup melalui pasukan suku sebagai upaya menduduki Kashmir. Dalam hal ini strategi yang digunakan oleh Pakistan ialah dimana mereka melakukan penyerangan sebelum India bereaksi dan kepemilikan Jammu dan Kashmir akan menjadi hukum (Indian Army, 2021). Hari Singh kewalahan menghadapi invasi tersebut karena kalah dalam segi militer. Hal ini kemudian mendorong Hari Singh untuk meminta bantuan kepada pemerintah India. Permintaan Hari Singh disetujui oleh India dengan syarat bahwa Kashmir harus menerima akses Kashmir ke India. Setelah menandatangani persyaratan

tersebut, pemerintah India kemudian mengirimkan pasukan militernya ke wilayah Lembah Kashmir dan memaksa pasukan suku Pathan untuk mundur. Pada 8 November 1947, pasukan India berhasil merebut Baramullah. Pertempuran tidak selesai sampai saat itu, pada musim semi tahun 1948 pemerintah Pakistan kembali mengirimkan pasukan mereka ke Kashmir. Setelah pertempuran yang terjadi selama beberapa bulan, pasukan Angkatan Darat Pakistan dapat merebut kembali beberapa tanah yang hilang di wilayah barat Kashmir. Pada bulan Desember 1947, pasukan India mengalami kemunduran karena masalah logistik (Global Security, 2011). Selain itu, banyak tentara India yang tidak siap bertempur di pergunungan Jammu dan Kashmir karena sedikit dari mereka yang berpengalaman melakukan pertempuran di daerah dingin. Kelemahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pakistan untuk memukul mundur pasukan India dari perbatasan. Secara keseluruhan, total 1500 tentara tewas di pertempuran ini baik tentara Pakistan maupun India. Dalam pertempuran ini Pakistan mampu memperoleh 2/5 wilayah Kashmir. Dua wilayah tersebut diintegrasikan ke dalam negara Pakistan. Disamping itu, Kashmir juga turut bergabung dalam konstitusi India berdasarkan pasal 370 dimana Kashmir diberikan status khusus.

Kegagalan India dalam pertempuran melawan Pakistan mendorong India untuk membawa kasus tersebut kepada PBB. Perdana menteri India, Jawahar Lal Nehru meminta PBB mengadakan plebisit untuk menentukan status akhir dari Jammu dan Kashmir. PBB kemudian mengeluarkan resolusi dimana akses Jammu dan Kashmir ke India atau Pakistan harus diputuskan dengan metode demokrasi dari plebisit yang bebas dan tanpa memihak. Sehingga, status masa depan Kashmir akan

ditentukan oleh rakyat Kashmir sendiri. Akan tetapi, resolusi ini tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya untuk menanggapi permohonan India, PBB akhirnya memberikan perjanjian gencatan Senjaya pada bulan Desember 1948 yang diikuti dengan persetujuan kedua belah pihak. India dan Pakistan juga setuju untuk mendatangkan pengamat PBB di Kashmir. Namun, Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan yang dikirim ke Kashmir gagal menyelesaikan kebuntuan politik antara India dan Pakistan.

2.1.2 Perang Indo-Pakistan Kedua

Perang kedua di Kashmir terjadi pada awal tahun 1965 dimana pasukan Pakistan dan India bertukar memperebutkan wilayah yang disengketakan di sepanjang perbatasan antara kedua negara. Perang ini dikaitkan dengan dua faktor yang mana pertama, pertempuran perbatasan di Runn of Kutch pada bulan April 1965 ketika pasukan India merambah ke wilayah Pakistan. Kedua yaitu operasi Gibraltar yang diluncurkan oleh Pakistan untuk mendukung “*freedom struggle*” ke wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India. Permusuhan diantara keduanya semakin meningkat ketika Angkatan Darat Pakistan berupaya untuk merebut Kashmir secara paksa pada bulan Agustus 1965. Didukung oleh kepercayaan Pakistan sejak kekalahan India pada jika militer India masih rentan dan dukungan dari rakyat pada pemerintah Pakistan jika masyarakat Kashmir tidak puas dengan pemerintahan India. Namun, upaya Pakistan untuk merebut Kashmir tidak berhasil dan justru menimbulkan perang kedua di wilayah sengketa tersebut. Pada tanggal 5 Agustus 1965 Pakistan meluncurkan operasi Gibraltar dimana sekitar 26.000 hingga 33.000 tentara Pakistan menyamar dan melintasi Garis Kontrol menuju berbagai daerah di Kashmir

dengan berpakaian seperti penduduk lokal. Pada bulan berikutnya, ketika Pakistan menyerang daerah Ackhnur, India langsung melawan serangan Pakistan dan memaksa pasukan Pakistan meninggalkan daerah tersebut. Pada perang tersebut, masing-masing pihak saling menahan tawanan dan beberapa wilayah pihak lain. Kerugian yang paling besar ditanggung oleh Pakistan yaitu 20 pesawat, 200 tank serta 3800 tentara menjadi korban. Kekalahan Pakistan pada perang ini dianggap masyarakat sebagai ketidakmampuan Ayub Khan dan pemerintahannya.

Menanggapi perang ini, PBB segera menyelesaikan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Disamping itu, baik India dan Pakistan juga diberlakukan embargo senjata. Difasilitasi oleh Perdana Menteri Soviet Alexei Kosygin, Perdana Menteri India Lal Bahadur Shastri dan Presiden Pakistan Ayub Khan akhirnya dipanggil untuk bertemu di Tashkent dalam upaya mencapai kesepakatan damai yang akhirnya ditandatangani pada Januari 1966. Dengan adanya kesepakatan damai tersebut akhirnya India dan Pakistan sepakat untuk menarik pasukan mereka di Kashmi dan kembali ke perbatasan internasional di Punjab.

2.1.3 Perang Indo-Pakistan Ketiga

Hubungan India dan Pakistan semakin memburuk ketika meletusnya perang sipil di Pakistan yang menghadapkan tentara Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Akibat dari pertemuran ini, sekitar 10 juta warga sipil Pakistan Timur melarikan diri ke India, Perang Indo-Pak yang terjadi pada tahun 1971 merupakan perang ketiga yang dilakukan oleh India dan Pakistan pasca kemerdekaan. Sebelumnya, Pakistan terbagi menjadi dua yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur dimana wilayah India

terjepit diantara kedua wilayah tersebut. Awal mula dari perang ini ialah dimana timbul perang sipil antara Pakistan Timur (sekarang menjadi Bangladesh) serta penguasa Pakistan Barat dikarenakan keangkuhan mereka. Masyarakat Pakistan Timur tidak puas dengan perlakuan yang diberikan oleh pemerintah Pakistan Barat. Pemimpin militer Pakistan jenderal Yahya Khan kemudian mengambil tindakan terhadap tersangka “Separatis Bengali”. Dalam perang ini, India turut ikut campur dengan mendukung “Separatis Bengali” yang menginginkan perpisahan dari Pakistan Barat. Pada 3 Desember 1971, Angkatan Udara Pakistan melakukan serangan udara di lapangan udara India Barat yang keesokan harinya langsung dibalas oleh India menyatakan perang dengans erangan udara. Disamping melakukan serangan, India juga melakukan gerilya untuk mencegah tentara Pakistan menyusup masuk ke wilayah Kashmir. Atas permintaan dari kelompok “Separatis Bengali”, India kemudian meluncurkan serangan darat, udara dan laut di wilayah Pakistan Timur untuk memaksa tentara Pakistan menyerah di Dhaka. India juga membawa 90.000 tentara Pakistan sebagai tawanan. Pakistan Timur kemudian resmi menjadi sebuah negara yaitu Bangladesh pada 16 Desember 1971. Sehubungan dengan Jammu dan Kashmir, kedua negara tersebut sepakat bahwa garis gencatan senjata yang diubah namanya menjadi *Line of Control* yang akan dihormati oleh India dan Pakistan tanpa mengurangi posisi yang diakui oleh kedua belah pihak. Pada tahun 1974, pemerintah negara bagain Kashmir mencapai kesepakatan dengan pemerintah India untuk menegaskan status mereka sebagai “unit konstituen dari persatuan India”. Namun, pihak Pakistan menolak keras kesepakatan tersebut.

2.1.4 Perang Kargil 1999

Kargil merupakan bagian dari wilayah persatuan Ladakh Barat, India barat laut yang sebelumnya merupakan bagian dari Jammu dan Kashmir. Wilayah ini terletak di Pegunungan Zaskar di Himalaya yang berbatasan dengan garis kontrol antara bagian-bagian wilayah Kashmir yang dikelola oleh India dan Pakistan. Letak Kargil yang sangat dekat dengan garis kontrol menyebabkan wilayah tersebut kerap menjadi lokasi konflik perbatasan antara India dan Pakistan. Bentrokan terbesar yang pernah terjadi di Kargil ialah perang Kargil pada bulan Mei-Juli 1999. Diawali pada bulan Mei dimana militer India mengetahui bahwa Pakistan menyusup ke wilayah yang dikelola oleh India. Akibat dari penyusupan ini terjadi pertempuran sengit antara kedua belah pihak selama 2 bulan. Tentara India merebut kembali sebagian besar wilayah yang telah diduduki oleh para penyusup Pakistan. Pertempuran berakhir pada bulan Juli ketika pasukan Pakistan yang tersisa mundur dari zona India. Akibat dari pertempuran ini ratusan kombatan tewas dari masing-masing pihak. Konflik Kargil diawali dari perjanjian yang ditandatangani oleh India dan Pakistan. Pada tahun 1948 kedua belah pihak mendirikan *Cease Fire Line* yang dianggap sebagai garis perbatasan internasional diantara kedua belah pihak. Pada tahun 1972, kedua negara kembali menandatangani perjanjian Simla yang memodifikasi *Cease Line Fire* menjadi *Line Of Control (LOC)*. Dalam kesepakatan ini kedua negara harus berada di wilayah kekuasaannya masing-masing. Akan tetapi pada tahun 1984 India melakukan pelanggaran ketika terjadi serangan yang diprakarsai oleh India di Siachen dan menduduki 10 km persegi di seberang garis kontrol. Selanjutnya pada tahun 1988 pasukan India kembali menyerang sektor

Qamar. Tentara Pakistan berupaya merespon serangan tersebut namun India berhasil menahan 10 pos dalam wilayah Pakistan disertai dengan serangan India di rute Lembah Nello di sisi Pakistan. Merespon tindakan India, Pakistan kemudian menyerang jalan Dras Kargil yang menyebabkan India mengalami kesulitan karena jalur suplai India menjadi terhalang. Pakistan berhasil menguasai wilayah Kargil serta beberapa pos yang berada di bawah kekuasaan India. Di sisi lain, India tidak tinggal diam dan mulai membentuk suatu misi yang disebut Operasi Vijay dengan mengirim pasukannya sekitar 20.000 tentara ke wilayah tersebut. Akibatnya, pecah perang disekitar garis kontrol yang turut menewaskan banyak masyarakat yang tidak bersalah. India kembali mendapatkan 80% wilayah mereka setelah melakukan serangan terhadap Pakistan. Akhirnya Pakistan menarik diri dari Kargil karena tekanan Amerika. Dampak dari konflik ini lebih besar ditanggung oleh Pakistan karena perang ini telah mempengaruhi citra Pakistan di kancah internasional. Komunitas internasional mulai lebih condong ke India daripada Pakistan. Domestik Pakistan juga turut mengalami kekacauan dimana pemerintahan Nawaz Sharif turut mundur di tahun yang sama karena ketidakmampuan mereka selama perang.

2.2 Kondisi Kashmir Pasca Pencabutan Status Otonomi Khusus

Pada 5 Agustus tahun 2019, pemerintah India secara resmi telah mengumumkan pencabutan status otonomi khusus untuk wilayah Kashmir yang telah berlaku selama hampir tujuh dekade. Pasal 370 merupakan salah satu pasal yang dimuat dalam undang-undang konstitusional India yang menyebutkan tentang status istimewa wilayah Kashmir dan mulai berlaku sejak 14 Mei 1954 (Kompas, 2020).

Tujuan dari diberlakukannya pasal ini ialah untuk membantu umat muslim di Kashmir menjaga nilai-nilai kebudayaan mereka ditengah wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan umat hindu. Sehingga, berdasarkan pasal 370 wilayah Kashmir yang beradi dibawah kekuasaan India memiliki posisi khusus dibawah persatuan India. Beberapa ketentuan yang dimuat dalam pasal tersebut ialah kebebasan untuk menjalankan pemerintah sendiri yang terpisah dengan pemerintah pusat India kecuali komunikasi, pertahanan serta urusan hubungan luar negeri. Selain itu, mereka juga memiliki hak atas bendera sendiri dan memiliki konstitusi sendiri. Pasal 370 juga memberikan status khusus kepada negara bagian Jammu dan Kahsmir untuk membeli properti di negara bagian serta beasiswa pendidikan. Setelah pencabutan status tersebut, maka status otonomi khusus yang selama ini diberikan ke wilayah Kashmir juga ikut dihapus. Sehingga warga Kashmir tidak lagi memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah India. Pencabutan hak semi-otonom Kashmir memmicu pergolakan sosial yang besar. Pakistan mneolak keras dan mengutuk keputusan India terhadap Jammu dan Kashmir karena wilayah yang berada dibawah kendali India tersebut masih menjadi wilayah sengketa yang diakui secara internasional (Mint, 2019). Lebih dari 900.000 personel tentara India dikerahkan ke wilayah yang diakui sebagai zona termiliterisasi di dunia (Health and Human Rights journal, 2021). Disamping itu, pemerintah India juga menerapkan *lockdown*, pemberlakuan jam malam, pemberhentian koneksi internet dan komunikasi serta pemblokiran jalan-jalan. Selama enam bulan sejak pencabutannya, Kashmir mengalami pemadaman total layanan 2G maupun 4G. Selain itu, pihak berwenang india juga menutup sekolah dan perguruan tinggi

dengan tanpa batas waktu dan mengerahkan puluhan ribu tentara melintasi lembah Kashmir untuk mengantisipasi serangan balasan dari pencabutan status otonomi khusus tersebut (CNBC, 2019).

Kehadiran militer yang cukup besar menjadi ancaman bagi keamanan dan kebebasan masyarakat Kashmir dengan dampak terburuk dari konflik ialah kekerasan yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Hal ini diakibatkan oleh pembatasan jam malam yang berlaku menghambat masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang sangat penting bagi lansia dan wanita. Izin malam yang diajukan oleh masyarakat Kashmir juga kerap ditolak dan ditunda di pos pemeriksaan. Kurangnya layanan internet dan komunikasi juga berdampak pada terhambatnya pengobatan jarak jauh dan saluran bantuan darurat. Sebuah laporan yang berjudul *“Two Years of Lockdown”* yang dirilis oleh masyarakat sipil India, Forum Hak Asasi Manusia Jammu dan Kashmir menyimpulkan jika situasi keamanan di wilayah tersebut telah semakin memburuk. Terdapat peningkatan kasus pelanggaran hak asasi manusia termasuk tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, serta penangkapan banyak aktivis dan penggunaan hukum yang kejam terhadap jurnalis yang melakukan pekerjaan mereka. Disamping itu hanya ada sedikit pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Dalam laporan ini juga ditambahkan jika motif sebenarnya ialah politis dimana orang-orang ditahan selama berbulan-bulan tanpa diadili dan pengadilan digunakan untuk melegitimasi akses dan kesewenang-wenangan polisi (Aljazeera, 2021). Setidaknya terdapat 8.000 kasus penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum.

2.3 Hubungan India dan Pakistan Pasca Pencabutan Pasal 370

Keputusan konstitusi India pada Agustus 2019 yang mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir memicu kemarahan Pakistan yang berujung pada pemutusan semua hubungan udara dan darat dengan India dan menanggihkan layanan perdagangan kereta api. Pasca pencabutan pasal 370 oleh India, Pakistan juga menanggihkan semua aktivitas perdagangan dengan India. Selain itu, pemerintah Pakistan juga mengusir komisioner tinggi India yang ditempatkan di Islamabad dan membatalkan utusan Pakistan untuk India yang seharusnya akan dikirim ke Delhi. Respon lain yang diberikan Pakistan dalam menanggapi tindakan India ialah dengan meminta Dewan Keamanan PBB untuk membahas perselisihan tersebut (BBC, 2019).

India juga menurunkan hubungan diplomatinya dengan Pakistan dikarenakan keterlibatan pejabat Pakistan dalam tindakan spionase dan berurusan dengan teroris. Setelah pencabutan pasal 370, Pakistan masih gencar melakukan berbagai upaya untuk mengangkat masalah Kashmir di forum internasional dan menggalang dukungan untuk menghadapi India. Akan tetapi sikap Pakistan ditanggapi oleh India dengan menyatakan pada masyarakat internasional jika penghapusan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir merupakan masalah internal mereka dan menyarankan Pakistan untuk menerima kenyataan dan menghentikan semua propaganda anti-India (The New Indian Express, 2020). Kantor urusan luar negeri Pakistan terus mencoba menekan India dengan mengelurkan pernyataan pers tentang dugaan pelanggaran gencata senjata oleh Angkatan Darat India. Selain itu, pada saat pertemuan *South Asian Association for*

Regional Cooperation (SAARC) yang seharusnya ditujukan untuk membahas kerjasama Covid-19 justru digunakan Pakistan untuk mengangkat masalah Kashmir. Tindakan Pakistan ini juga mendapat kecaman dari India karena menyalahgunakan kesempatan tersebut mengingat pertemuan itu merupakan *platform* kemanusiaan dan bukan *platform* politik. Ketegangan dan ketidakpercayaan diantara kedua pihak mengakibatkan tidak adanya gerakan maju dalam hubungan bilateral mereka.

2.4 Dampak Konflik Terhadap Perempuan di Kashmir

Selama puluhan tahun, sengketa perbatasan antara India dan Pakistan di Kashmir telah menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Termasuk wanita yang menjadi salah satu pihak yang menderita di tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Tindakan seperti pencabulan, penindasan, pemerkosaan dan penculikan kerap dialami oleh wanita di Kashmir. Motif menyalahgunakan perempuan secara seksual atau memperkosa mereka bertujuan untuk menghancurkan kemungkinan mereka bereproduksi dalam komunitas mereka sendiri. Disisi lain, posisi perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan seksual di dalam konflik juga dilatarbelakangi oleh sistem patriarki yang masih dianut oleh masyarakat. Data yang ada sejak tahun 2013 hingga 2019 menunjukkan bahwa terdapat 1.046 kasus pemerkosaan di Jammu dan Kashmir yang mana 820 kasus diantaranya melibatkan korban yang masih dibawah umur. Mulai tahun 2019 ketika status khusus dibawah pasa 370 dibatalkan dan wilayah tersebut dibagi menjadi 2 yaitu jammu dan Kashmir serta Ladakh. Berlanjut pada tahun 2020 hingga saat ini terdapat pembatasan karena wabah Covid-19. Laporan

mengungkapkan jika kejahatan terhadap perempuan mengalami peningkatan sekitar 11% dari 3.069 kasus pada tahun 2019 menjadi 3.414 pada tahun 2020.

Menurut outlet berita lokal yang terbanyak melakukan pelecehan seksual pada wanita Kashmir ialah pasukan India. Selama tiga dekade, pasukan India telah melakukan kekerasan seksual dan memerkosa lebih dari 11.000 wanita di Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal. Pada berita tersebut juga dikatakan jika 2.342 wanita di wilayah tersebut telah menjadi martir. Agresi dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan India di wilayah Jammu dan Kashmir juga telah menyebabkan hampir 23.000 wanita menjadi janda. 2.342 korban perempuan yang termasuk diantara 95.723 warga sipi secara total menjadi martir karena tentara India. Pasukan India menggunakan pelecehan dan penganiayaan sebagai senjata perang untuk tidak hanya menekan perjuangan pembebasan Kashmir tetapi juga untuk menekan aktivis dengan menggunakan ketakutan mereka yaitu wanita yang mereka cintai akan menjadi sasaran pelecehan seksual. *Kashmir Media Service* (KMS) melaporkan jika sebuah laporan oleh bagian penelitian dari layanan media Kashmir mengatakan jika wanita Kashmir telah menjadi korban terburuk dari konflik yang mengerikan dan membuat 22.923 wanita menjadi janda sejak 1989. Laporan ini juga menambahkan jika pasukan India secara rutin terlibat dalam pelecehan seksual terhadap perempuan Kashmir untuk menekan perjuangan pembebasan (Geo News, 2020).

Sebuah laporan tahun 1993 oleh *Human Rights Watch* dan *Physicians for Human Rights* menguatkan bagaimana pasukan keamanan India pada saat itu dengan sengaja dan taktis menggunakan pemerkosaan sebagai senjata untuk

beberapa alasan seperti memperkosa anggota perempuan dari keluarga yang tersangka militan sebagai bentuk hukuman, untuk memermalukan seluruh masyarakat, serta menurunkan moral mereka. Perempuan juga diperkosa dan dibunuh setelah disandera oleh aparat keamanan yang mencari kerabat laki-laki mereka. Sejak tahun 1990, pemerkosaan oleh pasukan keamanan India telah digunakan sebagai sarana untuk menargetkan wanita yang dituduh sebagai simpatisan militan. Pada insiden terkenal lainnya yaitu pada 23 february 1991 dimana personel bersenjata India Rajputana Rifles memperkosa 23-100 wanita di desa Kunan dan Poshpora selama operasi penjagaan dan pencarian untuk mencari militan. Seorang aktivis HAM yang berbasis di Kashmir menyatakan jika ada impunitas hukum yang dinikmati oleh tentara di Kashmir dimana mereka melihat penduduk sebagai tersangka dan pimpinan politik dari pasukan tersebut menyuruh mereka untuk mengontrol penduduk di Kashmir (WMC, 2020). Selama pencarian di desan Kunan dan Poshpora terhitung lebih dari 30 wanita Kashmir diperkosa dalam satu malam oleh angkatan bersenjata India.

Selama bertahun-tahun, pemerkosaan wanita di Kashmir oleh pasukan India telah menjadi sarana hukuman kolektif terhadap seluruh penduduk. Human Rights Watch telah mengidentifikasi dua skenario utama dimana perempuan Kashmir menjadi sasaran pemerkosaan oleh pasukan India dan selama operasi pencarian dan penjagaan untuk militan Kashmir dan selama serangan pembalasan oleh pasukan India setelah penyergapan militer (The American Bazaar, 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bagaimana wilayah Kashmir memiliki keunggulan yang berpengaruh besar pada India dan Pakistan sehingga

tidak dapat disangkal jika keunggulan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kedua negara tersebut masih memperebutkan wilayah Kashmir hingga saat ini. Kegigihan kedua negara dalam memperebutkan Kashmir telah menimbulkan perang yang memakan banyak korban jiwa tidak hanya pasukan militer tetapi juga masyarakat sipil yang tidak bersalah. Pasca penghapusan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir juga harus hidup dibawah tekanan dimana banyaknya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah India baik pembatasan komunikasi, jaringan maupun penetapan jam malam. Dari uraian diatas juga dapat dilihat bagaimana banyak wanita yang menjadi korban dari konflik perbatasan antara India dan Pakistan. Kekerasan yang diterima oleh masyarakat menunjukkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.